

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PIUTANG TERTUNGGAK ANGGOTA PADA UNIT
USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAMNASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
**(Studi Kasus Pada Nasabah PNPM Desa Tihengo
Kecamatan Ponelo Kepulauan)**

Oleh

**PRATIWI YASIN
E11.19.037**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PIUTANG TERTUNGGAK ANGGOTA PADA UNIT
USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAMNASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada Nasabah PNPM Desa Tihengo
Kecamatan Ponelo Kepulauan)**

Oleh

**PRATIWI YASIN
E11.19.037**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana yang
telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 18 Maret 2023**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr Bala, S.I.P.,S.Psi.,SE.,MM
NIDN :0002057501

Pembimbing II



Shella Budiawan SE.,M.Ak
NIDN : 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG
TERTUNGGAK ANGGOTA PADA UNIT USAHA
SIMPAN PINJAM PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Pada Nasabah PNPM Desa Tihengo
Kecamatan Ponelo Kepulauan)

OLEH

Pratiwi Yasin

E1119037

Diperiksa oleh Dewan Pengaji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Reyther Bikri, SE.,M.Si
(Ketua Pengaji)

2. Afriana Lomagio, SE.,M.Ak
(Anggota Pengaji)

3. Nurbaiti Mokoginta, SE.,M.Ak
(Anggota Pengaji)

4. DR. Bala Bakri, SE.,S.Ip.,S.Psi.,MM
(Pembimbing Utama)

5. Shella Budiawan, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan dosebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperolah karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 18 Maret 2023



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa dukungan dan Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karuania-Nya sehingga skripsi ini telah terselsaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kedua orang (Alm/Almh) dan nenek tercinta (Rohana Angguda). Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak henti sampai saat ini. Tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya dan orang special (Frendi Laboro) yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun material serta orang-orang terdekat dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan Dosen jurusan Akuntansi serta Almamater universitas Ichsan Gorontalo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Tertunggak Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan ” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta dan kakak-kakak saya yang telah membersarkan, mendidik, member dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih saying yang takkan tergantikan oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.SI., C.Sr, selaku ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT)Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Bapak Muh. Sabir M, SE.,

M.Si selaku Wakil Dekan . Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Bala, S.IP.,S.Psi.,SE.,MM selaku pembimbingI dan Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak ibu Dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan dan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesesmpurnaan skripsi ini masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 18 Maret 2023

Pratiwi Yasin

ABSTRACT

PRATIWI YASIN. E1119037. THE ANALYSIS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF OUTSTANDING RECEIVABLES OF MEMBERS IN THE SAVINGS AND LOAN BUSINESS UNIT OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) OF TIHENGKO VILLAGE IN THE PONELO ISLANDS SUBDISTRICT

This study aims to find and analyze the extent of the internal control system of accounts receivable of PNPM in Tihengo Village, Ponelo Islands Subdistrict. This type of study is qualitative research, defined as a form of interpretation of data concepts. The function of qualitative data is to interpret raw data into details, explanations, or descriptions. The results of this study indicate that the Internal Control System of PNPM as seen from credit granting, billing and determination, and proper control has not been implemented properly. In the receivables control system applied by the Activity Management Unit of the Ponelo Islands Subdistrict, all members who are members of the group must be mutually responsible for every decision that will be taken. Efforts made to overcome the problem of delinquent installments are by giving warning letters, visits or family approaches, and training.

Keywords: *internal control system, accounts receivable, SPKP, PNPM*



ABSTRAK

**PRATIWI YASIN. E1119037. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PIUTANG TERTUNGGAK ANGGOTA PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DESA
TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana sistem pengendalian internal piutang pada PNPM di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah kedalam uraian, eksplansi ataupun deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada PNPM yang dilihat dari pemberian kredit, penagihan dan penetapan dan pengendalian yang layak belum dilaksanakan dengan baik. Sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Ponelo Kepulauan, semua anggota yang tergabung dalam kelompok harus saling bertanggung jawab atas setiap keputusan yang akan diambil. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah angsuran menunggak yakni dengan member surat peringatan, kunjungan atau pendekatan secara kekeluargaan dan pelatihan.

Kata kunci: sistem pengendalian interen, piutang, SPKP, PNPM



DAFTAR ISI

Teks	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.3 Maksud dan Tujuan penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1Sistem Pengendalian Internal	9
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal	9
2.1.1.2 Prinsip Dasar Pengendalian Internal	12
2.1.1.3 Tujuan Pengendalian Internal.....	13
2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal	15
2.1.1.5 Konsep dasar Struktur Pengendalian Internal	17
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Piutang	17
2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Piutang.....	17
2.1.2.2 Pengendalian Internal atas Piutang.....	22
2.1.2.3 Tujuan Sistem Pengendalin Internal Piutang	26
2.1.3 Piutang	29
2.1.3.1 Pengertian Piutang.....	29
2.1.3.2 Jenis-jenis Piutang	30
2.1.3.3 Bentuk Perjanjian Utang Piutang	30
2.1.3.4 Faktor-faktor penyebab piutang macet.....	31
2.1.3.5 Prosedur Penagihan Piutang.....	31
2.1.3.6 Teknik Penyelesaian Piutang Bermasalah.....	31

2.1.4 Progman Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	32
2.1.4.1 Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan.....	32
2.1.4.2 Kelompok (SPKP) dan (PNPM) Mandiri.....	33
2.1.4.3 Tahapan Pengajuan Proposal	34
2.1.5 Simpan Pinjam	35
2.1.5.1 Pengertian Simpan Pinjam	35
2.1.5.2 Syarat-syarat Dalam Simpan Pinjam.....	36
2.1.5.3 Unsur-unsur Pinjam.....	38
2.1.4.4 Penelitian Terdahulu	41
2.2 Kerangka Pemikiran	39
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Objek Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian.....	42
3.2.1 Metode yang digunakan	42
3.2.2 Operasional variabel Penelitian	43
3.2.3 Informan Penelitian.....	44
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.2.5 Teknik Pengumpulan	46
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.2.7 Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran umum hasil penelitian	50
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi PNPM	50
4.2 Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Teks	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Struktur organisasi UPK PNPM.....	53

DAFTAR TABEL

Teks	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Piutang Tertunggak PNPM-Mpd Desa Tihengo Tahun 2019-2021	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Operasioal Variabel Informan.....	43
Tabel 3.2 Jumlah Informan	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan perekonomian dunia menyebabkan adanya peningkatan perkembangan dunia usaha. Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai laba yang maksimal, melalui pendapatan yang diperoleh, perusahaan dapat terus beroperasi dan terus mengembangkan usahanya. Siklus pendapatan terutama piutang usaha perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi, Salah satu resiko yang mungkin terjadi seperti piutang macet.

Piutang adalah bentuk yang dilakukan oleh perusahaan dimana pembayaran tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat secara bertahap. Pemberian piutang juga menimbulkan resiko yang cukup besar dimana akan terjadi keterlambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang macet. Begitu juga dengan pengelolaan piutang yang ada di PNPM Mandiri Desa Tihengo kecamatan ponelo kepulauan.

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar yang ada dalam neraca perusahaan. Perusahaan diharapkan memiliki pengelompok piutang berdasarkan jatuh temponya. Pengelompokan ini berguna untuk mengantisipasi tindakan dan yang kedua untuk keputusan mengambil tindakan lebih lanjut. Adapun pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebagai contoh jatuh tempo yang terjadi 60 hari):

Piutang standar, yaitu piutang yang masih bisa tertagih karena dalam krun waktu jatuh tempo yang masih berjalan (<60 hari), Piutang jatuh tempo, yaitu

kondisi piutang yang sudah jatuh tempo dan harus terjadi penagihan (60 hari), Piutang *over due*, yaitu kondisi piutang yang melebihi batas jatuh tempo, namun masih bisa ditolerir dengan alasan yang bisa diterima perusahaan (60 hari + 30 hari), Piutang *over limit*, yaitu kondisi piutang yang sangat melebihi batas maksimal jatuh tempo dan melebihi tingkat fleksibilitas jatuh tempo (> 90 hari) dan Piutang yang tak tertagih, yaitu kondisi piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih dengan baik (365 hari).

Piutang biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari. Dampak dari pemberian piutang ini, nantinya dapat menyebabkan muncul piutang macet atau bermasalah. Penyebab piutang macet bisa terjadi dari segi pemilik piutang karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberian piutang, kurangnya analisis seleksi dalam pemberian kredit, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau pihak yang berutang memang mempunyai motif secara tidak sengaja tidak membayar. Seperti yang terjadi pada pengendalian piutang PNPM MPd di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

PNPM Mandiri adalah program yang dirancang pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. salahsatu program yang di lakukan PNPM Mandiri yaitu SPKP (simpan pinjam Kelompok perempuan) yang dirancang dengan tujuan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dengan system kredit tanggung renteng. Namun,

pemberian kredit menimbulkan resiko yang cukup besar dimana akan terjadinya keterlambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang macet.

Dasar hukum pelaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengacu pada landasan Konstitusional Undang-ungang Dasar 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan peraturan perundangan yang berlaku, serta landasan khusus Pelaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang akan disusun kemudian. sesuai dengan Perpres 15/2010, Pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, yaitu salah satunya terdapat pada klaster II tentang pemberdayaan masyarakat atau PNPM-Mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) merupakan mekanisme program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat, Terutama pada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang begitu mudah untuk mendapatkan pinjam dan dengan cara berkelompok. Salah satu programnya yang dilakukan PNPM adalah pinjaman,pinjaman ini dalam bentuk kegiatan simpan pinjam Kekompok perempuan (SPKP), Jadi kegiatan SPKP ini hanya dilakukan oleh anggota khusus perempuan dan proritas kelompok yang memiliki rumah tangga miskin.Dalam pinjaman tersebut dimaksudkan sebagai modal usaha yang memiliki tujuan agar dapat menambah ekonomi keluarga bagi iburumah tangga miskin.Dalam hal ini PNPM memberikan bantuan kredit sebagai

modal usaha kepada masyarakat yang akan mendirikan atau menjalankan usaha yang kemudian akan menimbulkan piutang.

Namun salah satu program PNPM Mandiri yaitu SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) masih berjalan hingga saat ini karena program dianggap baik dan masih banyak piutang yang beredar. Tidak sedikit dalam piutang sering ditemui masalah seperti piutang macet, meskipun dalam pengelolaan SPKP ini sudah sesuai SOP (standar operasional prosedur), dan berbagai macam cara dalam penyelesaian piutang bermasalah sudah dilakukan tetapi saja terjadi piutang macet.

Sejak tahun 2013 Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan telah melakukan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), yang mana program tersebut diadakan untuk membantu masyarakat khususnya kelompok perempuan dalam mengembangkan atau menciptakan usaha untuk membangun kesejahteraan hidup.

Sistem peminjaman pada SPKP harus disertai dengan kelompok dan setiap kelompok berisikan 10 s/d 20 orang, kemudian setiap kelompok mempunyai kepengurusan yang jelas minimal ketua kelompok harus menagih hutang dikelompok tersebut. Pemberian pinjaman sesuai tujuan program SPKP diperuntukkan khusus untuk perempuan yang mempunyai usaha atau menciptakan usaha sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengembangkan perekonomian. Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota keluarganya dan mencantumkan tandatangan pihak keluarga yang setuju, kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjaman harus dinilai kondisi pinjamannya.

Setiap melakukan pinjaman pasti selalu saja ada penunggakan pembayaran yang menyebabkan piutang macet atau bermasalah. Hal ini seharusnya ditindaki dengan tegas, karena seharusnya dana pinjaman yang sudah lunas akan digulirkan kepada kelompok lain atau kelompok baru yang melakukan pinjaman.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh langsung dari kantor PNPM-MPD bagian SPKP di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan, peneliti mendapatkan data perkembangan total jumlah piutang dan besaran piutang tertunggak PNPM-MPD bagian SPKP di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah Piutang PNPM Mandiri Perdesaan Desa
Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Tahun 2019-2021
(Dalam Rupiah)

TAHUN	Jumlah Piutang (Dalam Rupiah)	Jumlah Piutang tertunggak	Presentase Piutang tertunggak(%)
2019	161.441.000	24.518	15,18%
2020	138.596.500	23.969	17,29%
2021	169.540.500	59.609	35,15%

Sumber : Laporan PNPM Per 31 Desember Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentasi piutang tertunggak PNPM-MPD bagian SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan namun pada tahun 2020 s/d tahun 2021 naik lagi bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun

sebelumnya.. Salah satu penyebabnya yaitu kurang tegasnya sistem penagihan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas menagih hutang disetiap kelompok sehingga setiap kelompok merasa anggap remeh pada pembayaran hutangnya dan menganggap bisa dibayar dikemudian hari saja walaupun pembayaran sudah jatuh tempo. Faktor yang menyebabkan piutang tertunggak menjadi tinggi yaitu adanya penggandaan tugas pada pengurusan UPK yang hanya berjumlah tiga orang yang menjadi pengelolaan pembagian tugas menjadi tidak efektif.

Piutang tertunggak atau *Non Performing Loan (NPL)*, menjadi salah satu penyakit yang menghambat perkembangan sector jasa keuangan, Piutang tertunggak disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Menurut Veithzal, Faktor internal penyebab timbulnya piutang tertunggak adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, I'tikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi piutang tertunggak adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bungakredit.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pengendalian intern piutang yang diterapakandi PNPM-Mandiri Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan, dan penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di UPK PNPM Mandiri bagian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Tertunggak Anggota pada**

Unit Usaha Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Piutang tertunggak Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan?

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Piutang tertunggak Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

1.3.2 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal Piutang tertunggak Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berupa informasi tentang pengendalian piutang pada usaha sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

b. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis dan pengalaman dalam menyusun laporan penelitian terutama yang berkaitan dengan pengendalian piutang usaha sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi dasar informasi yang memadai tentang pengendalian piutang usaha.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian meningkat terhadap pengendalian intern. Adapun definisi pengendalian intern yaitu sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. Kehandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: “*Internal control is a process, aected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*”.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layal bagi manajemen, bahwa perusahaan telah

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventi*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korekti*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*).

Pengendalian internal dapat diberikan dalam berbagai sudut pandang, yaitu:

- a. *Preventif controls*, yaitu pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan.
- b. *Detection control*, pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data rekam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan).
- c. *Corrective control*, adalah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penalihgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

Hery (2013:159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedian informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh karyawan perusahaan.

Diana (2011:82) pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakrutan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhi kebijakan material yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal adalah proses yang dirangang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efesiensi operasireabilitas pelaporan keuangan, dan ketataan pada peraturan hukum yang berlaku, Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan baik oleh manajer, *user* sistem akuntansi, perancang sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi (TMBooks, 2015:36).

2.1.1.2 Prinsip Dasar Pengendalian intern

Ada empat konsep dasar yang mendasari struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, diantaranya tanggung jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat (*inherent*), dan metode pengendalian data.

a. Tanggung jawab manajemen

Manajemen, dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang

menyatakan bahwa manajemen, dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

b. Kepastian yang wajar

Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan multak, bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian intern disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian. Sehingga, manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian yang ideal karena biayanya mungkin terlalu tinggi.

c. Keterbatasan yang melekat(*inherent*)

Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan, meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksanaannya. Sebagai contoh, prosedur perhitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan dua orang karyawan yang harus menghitung secara terpisah.

d. Metode pengelahan data

Konsep pengendalian internal berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi (EDP). Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional.

2.1.1.3 Tujuan Pengendalian internal

Tujuan pengendalian mencakup kendalian intern menrurt pendapat para ahli dapat dijelaskan bahwa tujuan pengendalian intern yaitu hal mencakup tiga hal pokok yang dapat diuraikan sebagai beririkut :

- a. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tujuan-tujuan pelaporan. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
- c. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Tujuan dirancang pengendalian intern dari segi pandang manajemen ialah untuk dapat memperoleh data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, akurat, unik, *reasonable*, dan kesalahan-kesalahan data deteksi. Tujuan berikut adalah dipatuhi kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu akuntansi tepat. Tujuan selanjutnya ialah pengamatan asset, yaitu dengan adanya *otorisasi*, *distribusi output*, data valid dan diolah serta disimpan secara aman.

Suatu pengendalian intern yang baik dalam perusahaan akan memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri, karena:

- a. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.
- b. Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan.
- c. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
- e. Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian *substantias* bahan bukti/data perusahaan yang cukup besar oleh akuntansi public.

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern :

- a. Kesalahan dalam perimbangan.
Seringkali, manajemen dan personel lainnya dapat salah dalam melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena prosedur lainnya.
- b. Kemacetan
Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena prosedur salah memahami intruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau

permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

c. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manuaktur, dan pengajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktir, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pemberian dan pemasok atau antara seorang karyawan didepartemen penjualan dengan pelanggan).

d. Penolakan manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonusatau nilai pasar saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan (*override*) termasuk membuat penyajian salah dengan sengaja kepada auditot dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

e. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Selain itu, faktor manusia adalah faktor yang penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Sebuah sistem pengendalian internal yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena itu adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk sistem pengendalian intern yang dijalankan perusahaan.

2.1.1.5 Konsep Dasar Struktur Pengendalian Internal

1. Dilakukan dan merupakan tanggung jawab oleh manajemen.
2. Memberikan kepercayaan dan kepastian yang wajar namun tidak *absolute*.
3. Adanya keterbatasan. maksudnya pengendalian internal tidak melalui efektif tergantung dengan kompetensi dan keandalan pelaksanaan.
4. Sistem pengelolaan data yang berguna untuk mengembangkan informasi terkait pengendalian internal.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Piutang

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Piutang

Sistem pengendalian internal piutang yang benar merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sistem pengendalian internal piutang yang baik maka akan mempengaruhi juga keberhasilan perusahaan dalam menjalankan penjualan secara kredit. Begitu pula sebaliknya, jika dalam sistem pengendalian internal piutang terdapat kelalaian maka bisa berakibat fatal bagi perusahaan, misalkan menumpuknya piutang yang tak tertagih.

Pengendalian intern menurut COSO terdiri atas lima komponen yang saling terkait berikut ini :

a. Lingkungan Pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen-komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur, Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4) Struktur organisasi
- 5) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran Risiko

Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang terjadi dan cara negatif memenuhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Persoanl baru
- 3) Sitem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- 4) Teknologi
- 5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- 6) Restrukturisasi komporasi
- 7) Operasu luar negeri
- 8) Standar akuntansi baru

Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan. Menilai risiko kredit, *credit manager* harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menetukan besar kecilnya kredit. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam memerhatikan lima “C” tersebut adalah *character, capacity, collateral,.capital, dan conditions.*

character, menunjukkan kemungkinanatau profitabilitas dari pelanggan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting, karena

setiap transaksi kredit mengandung kesanggupanuntuk membayar. *Capacity*, adalah pendapatan subyek mengenai kemampuan dari pelanggan, ini diukur dengan *record* diwaktu lalu,disrtai dengan observasi fisik (*survey*) pada rumah dan kantor maupun usaha dari calon debitur.*capital*, diukur oleh posisi *financial*pelanggan secara umum, dimana halini ditunjukan oleh analisi *ratio financial*,yang khususnya ditekankan “*tangible net worth*” dari perusahaan.*Collateral*, dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang berkaitan atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada pelanggan tersebut. *Condition*, menunjukan pengaruh langsung dari *trend* ekonomi pada umumnya trhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khususdalam suatu bidang ekonomitentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan ditetapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi.

- 1) Review terhadap kinerja
- 2) Pengelohan informasi
- 3) Pengendalian pihak
- 4) Pemisahan tugas

Prosedur pemisahan tugas dalam rangka memenuhi aktivitas pengendalian harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
- 2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melakukan semua tahap suatu transaksi.

d. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan cacatan dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporakan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas infomasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

- 1) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
- 2) Bagaimana transaksi tersebut dimulai.

- 3) Cacatan akuntansi, informasi pendukung,dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelohan dan pelaporan transaksi.
- 4) Pengelohan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan kedalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti computer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, mmelihara, dan mengakses informasi.

e. Pemantauan dan pengawasan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada informasi komunikasi untuk tujuan manajemen pengendalian dan pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengendalian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam piutang yaitu:

- 1) Volume penjualan kredit
- 2) Syarat pembayaran penjualan kredit
- 3) Ketentuan tentangpembatasan kredit
- 4) Kebijaksanaan dalam mengumpul piutang
- 5) Kebiasaan membayar dari para langganan.

2.1.2.2 Pengendalian Internal atas Piutang

Setiap perusahaan yang melakuan kebijakan penjualan kredit atau bergerak dibidang pembayaran sebagaianbesar asset yang dimiliki adalah berupa piuang.

Agar piutang yang dimiliki perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya penunggakan pembayaran, perusahaan perlu menerapkan kebijakan piutang yang baik dan tepat. Wujudkan dari kebijakan tersebut yaitu dengan adanya pengendalian intern dan pengawasan atas piutang.

Untuk mewujudkan pengendalian intern dan pengawasan terhadap piutang, maka perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Penerapan Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat memberian kredit haruslah ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan dan menghambat para pelanggan yang baik dan potensial. Pada umumnya dalam pemberian kredit berpedoman pada prinsip-prinsip 5, yang terdiri dari :

- a. Character (Watak)

Watak dan Character adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat diartika sebagai kepribadian , mudah dan kejujuran seseorang. Watak seseorang debitur sulit untuk ditentukan apalagi bila debitur baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. menentukan watak dari seorang debitur diperlukan pencarian informasi dan penyelidikan tentang kehidupan debitur. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki watak tidak baik akan berisiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyimpanan tersebut dapat mengakibatkan pengembalian kredit tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga kredit menjadi tidak dapat tertagih atau macet.

- b. Capital (Modal)

Modal sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha baik oleh perorangan maupun badan usaha. Seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Sebagai contoh orang yang akan mengajukan kredit untuk membeli mobil maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka merupakan modal yang dimiliki oleh debitur dan kredit yang diberikan fungsi sebagai sebagai tambahan modal. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki dapat dianalisa dari laporan keuangan. Semakin besar modal yang dimiliki menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya baik.

c. Capacity (Kemampuan)

Debitur yang memiliki karakter atau watak yang baik selalu akan memikirkan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan cukup yang berasal dari pendapatan. Analisa kemampuan debitur diperlukan untuk mendapatkan informasi secara benar mengenai data menghasilan atau pendapatan, pekerjaan atau usaha debitur yang mengindikasikan perolehan pendapatan debitur sehingga memberikan keyakinan adanya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.

d. Collateral (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutangnya jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan jalan

penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jenis jaminan dapat meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda yang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mobil, saham dan jaminan yang bersifat immateriil yang secara fisik tidak dapat dikuasai oleh pemberian kredit misalnya jaminan pribadi (Borgtocht) dan garansi Bank (Bank Guarantee). Jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberian kredit mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapatkan perhatian penuh dalam proses analisis kredit adalah kondisi ekonomi Negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit dalam pengembalian hutangnya dan hal ini sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi Negara yang buruk dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

2. Penagihan

Pelaksanaan penagihan merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan pemberian kredit dimana telah ditetapkan mengenai syarat-syarat pemberian kredit diantaranya syarat jatuh tempo pembayaran. Perusahaan dapat melakukan pengendalian piutang yang saat jatuh tempo belum melakukan pembayaran dengan

dimulai daricara pengiriman surat tagihan kepada para debitur, melalui telepon, melalui petugas yang datang ke debitur, atau melalui tindakan secara hukum.

3. Penerapan Dan Penyelenggaran Pengendalian Intern Yang Tepat

Adanya pengendalian intern yang tepat piutang diperlukanguna mendukung tahap pemgemdalian seperti penetapan pemberian kredit dan pelaksanaan penagihan. Dalam penerapan intern atas piutang ini, perusahaan harus memiliki prosedur-prosedur yang tetap seperti :

- a) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari funsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk piutang dagang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.
- b) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
- c) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d) Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang. Total dari saldo-saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling tidak sebulan sekali. Disamping itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan putang.
- e) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (*again schedule*).

2.1.2.3 Tujuan System Pengendalian Internal Piutang

1. Tujuan Pengendalian Intern

Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatkannya volume penjual, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian terhadap piutang tersebut.

Perhitungan sebesar presentase tertentu dari jumlah piutang usaha dapat dibagi menjadi 2 metode:

- 1) Metode saldo akhir piutang.

Presentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha yang diperkirakan tidak dapat ditagih di tentukan.

- 2) Metode umur panjang

Piutang usaha akan dikelompok-kelompokan berdasarkan pada masing-masing karakteristik umurnya, yang berarti adanya pengelompokan piutang usaha kedalam katagori yang berdasarkan atas tanggal jatuh temponya piutang.

2. Karakteristik system pengendalian intern atas piutang

Output dari sistem pengendalian intern piutang adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik.

3. Konsep Pengendalian Intern Piutang

Terdapat lima komponen pengendalian intern menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization), yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.

- a) Lingkungan Pengendalian
- b) Penentuan Risiko
- c) Aktivitas Pengendalian
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Pengawasan dan Pemantauan

Adapun sistem pengendalian intern atas piutang secara keseluruhan antara lain sebagai berikut :

- a. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan (operasi) dari “Fungsi Akuntansi Untuk Piutang”
- b. Pengawai yang menangani akuntansi piutang, harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang
- c. Semua transaksi pemberian pinjaman, pemberian potongan dan penghapusan piutang, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang (*Accounts Receivable Subsidiary Ledger*)
- e. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (*Aging Schedule*).

2.1.3 PIUTANG

2.1.3.1 Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau

dalam siklus kegiatan perusahaan. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Contoh transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit,pemberian pinjaman kepada nasabah, atau karyawan, memberikan uang muka kepada anak perusahaan, dan lain sebagainya.

Fahmi (2016:10) menyatakan bahwa piutang merupakan suatu bentuk usaha yang pembayarannya dilakukan secara bertahap bukan secara tunai. Sedangkan menurut Ponto (2013:287), piutang diartikan sebagai hak untuk menagih sejumlah tertentu dari organisasi (dalam hal ini perusahaan) sebagai akibat dari transaksi tersebut. terhadap pihak lain sebagai akibat dari suatu transaksi ekonomi.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Piutang

Piutang dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan terjadinya, yaitu piutang dagang dan piutang nondagang (Nuraziah,2018) :

1. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.
2. Piutang nondagang adalah piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.

2.1.3.3 Bentuk Perjanjian Utang Piutang

1. Perjanjian lisan sifatnya sederhana

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikut kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apalagi isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya juga kecil.

Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena pihak merasa saling percaya. Kelemahannya, apalagi debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, apalagi berbaik menunduh pihak kreditur yang mengada-ada, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.

2. Perjanjian tertulis untuk kepentingan pembuktian

Perjanjian utang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang piutang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu para pihak membuat sendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya mencantumkan pula tanda tangan saksi. Dapat pula perjanjian tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu pihak membuat sendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya mencantumkan pula tanda tangan saksi. Dapat pula perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris, dengan cara mereka datang ke kantor notaris dan mengutamakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang.

2.1.3.4 Prosedur Penagihan Piutang

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu sebagai berikut :

- a. Melalui surat, teknik ini dilakukan bilamana pembayaran hutang pelanggaran dari pelanggan sudah lewat dari beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan tetapi belum melakukan pembayaran.
- b. Melalui telepon, teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apalagi setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan masih belum dibayarkan.
- c. Kunjungan personal, yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggaran.
- d. Tindakan-tindakan hukum, teknik ini yang paling akhir dilakukan bila ternyata pelanggan tidak menunjukkan I'tikad yang baik untuk melaksanakan kewajiban membayarkan hutangnya.

2.1.4Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)

2.1.4.1 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonedia yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd), adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. “Sedangkan kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Menurut Bidgeman dan Davis; Kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu :

1. Kebijakan sebagai tujuan

Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan .

2. Kebijakan sebagai pilihan atau tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karna dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintah.

3. Kebijakan sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prkarya dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.1.4.2 Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Seperti dalam peneliti sebelumnya (Widanarto dan Sudibia,2016), Program SPKP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatkan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPKP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan perdanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskindan penciptaan lapangan kerja (Depdagri RI, 2008). Menurut Subagyo seperti dalam jurnal Widanarto dan Sudibia (2016), program SPKP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, agar program tersebut berjalan efektif.

2.1.4.3 Tahapan Pengajuan Proposal

Untuk mengajukan proposal pinjaman, kelompok perempuan harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam mekanisme pelaksanaan SPKP dengan ketentuansebagai berikut Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri:

1. Kelompok calon penerima manfaat mengakukan proposal pinjaman ke UPK yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa,dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonana kredit
 - b. Daftar pengurus dan anggota kelompok
 - c. Rekapitulasi data peminjam dan besar pinjam yang diajukan
 - d. Rencana angsuran kelompok
 - e. Aturan-aturan kelompok atau ADART
 - f. Surat pernyataan kesediaan anggota kelompok tanggung rentang
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP atau indentitas lain yang masih berlaku.
 - h. Foto copy Rekening tabungan kelompok jika ada
2. Setelah proposal tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka usulan kelompokdiverifikasi Mengacu pada SOP Tim Verifikasi.
3. Setelah proses Verifikasi selesai maka BKAD mengelar MAD perguliran yang dihadiri oleh unsure pemerintah desa ,unsur lembaga desa, BKAD,BP-UPK , TV dan unsur kelompok pengusul.
4. kelompok yang lolos ferivikasi berhak mengkuti MAD untuk dibuat perangkingan dkaitkan dengan daftar tunggu kelompok
5. kelompok yang tidak lolos verifikasi, mendapatkan pembinaan dan penguatan untuk kemudian mengambil kesempatan ikut MAD berikutnya
6. dalam MAD itu, kelompok yang baik tidak menunggak, mendapatkan prioritas dibandingkan kelompok baru, dan juga dirangkaikan diantara mereka

7. BKAD mengajukan ke camat untuk menerbitkan surat penetapan camat

2.1.5 SIMPAN PINJAM

2.1.5.1 Pengertian simpan pinjam

Menurut Melayu P. Hasibuan simpan pinjam adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyaturkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang dibutuhkan, hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya rentenir yang merugikan masyarakat. menurut ninik widayanti: "simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembetulkan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Menurut umar burhan: "simpan pinjam adalah suatu usaha usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam bentuk jumlah dalam waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati.

Dalam islam simpan pinjam dikenal dengan istilah "ariyah" ariyah merupakan etimologi, ariyah adalah datang dan pergi. sedangkan secara syara ariyah adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar lembaga simpan pinjam sesuai islam dan terhindar dari riba, diantara adalah:

- a. Cara pertama: lembaga simpan pinjam membeli barang-barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat umum. Keuntungan dari hasil

penjualan dibagi kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke lembaga simpan pinjam tersebut.

- b. Cara kedua: lembaga simpan pinjam ini juga bisa meminjamkan uang kepada para anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka lembaga simpan pinjam bisa menerapkan system bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi akad ini tidak dinamakan pinjaman, tetapi disebut dengan mudharabah.

2.1.5.2 Syarat –Syarat Dalam Simpan Pinjam

Syarat orang yang meminjamkan harus orang yang sah tasharufnya. Syarat sah benda yang dipinjamkan ada tiga perkara:

1. Harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah di izini, atau telah disewa.
2. Bendanya yang harus ada gunanya serta penggunaanya yang diperbolehkan oleh syarat.
3. Setelah dipergunakan bendanya masih utuh, jadi tidak sah meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan seperti makanan,dan lain sebagainya

Dalam akad ariyah ini bagi orang yang meminjamkan boleh meminjamkan bendanya dengan tidak ada batas waktunya., dan boleh membatasi waktunya. Dan dia boleh meminta benda yang dipinjamkan sewaktu- waktu yang dikehendakinya. Dalam akad ini apabila orang yang meminjami meninggal dunia, gila atau ayan maka akadnya batal. Jadi apabila orang yang meminjam meninggal

dunia maka untuk ahli warisnya wajib mengembalikanya. Dan apabila benda tersebut digunakan ahli waris maka hukumnya dosa, kecuali dia membayar sewa kepada orang yang meminjamnya.

2.1.5.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

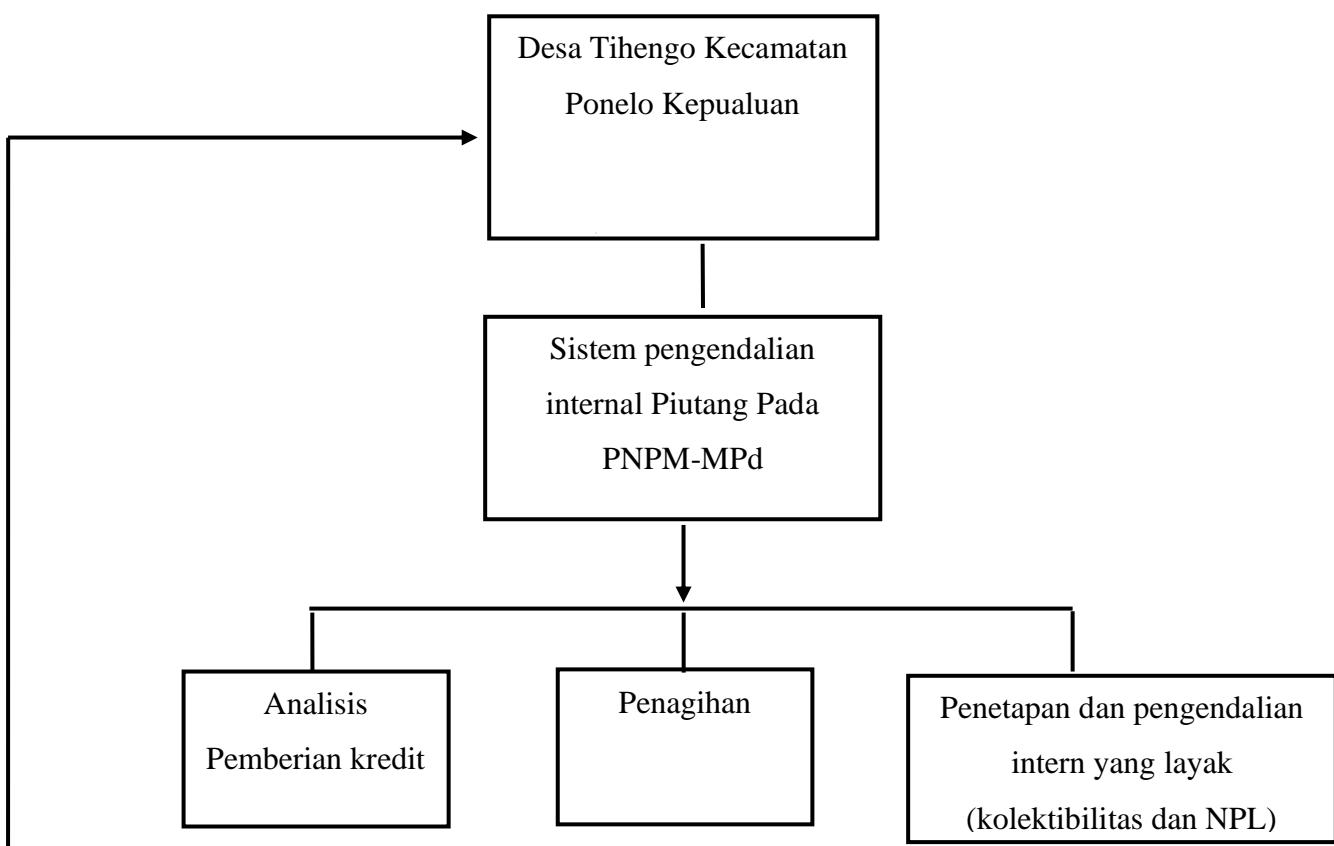
Tabel 2.1Penelitian Terdahulu

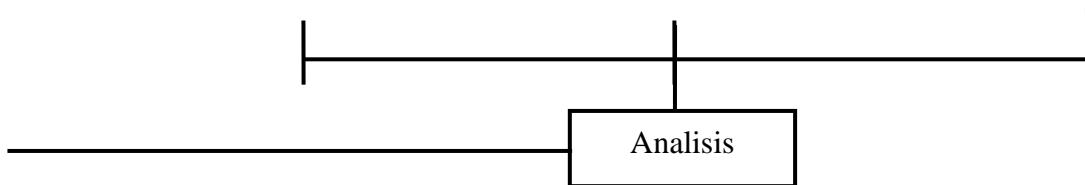
NO	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Afifah et al.,(2015)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang pada PT GIS	Implementasi sistem pengendalian internal atas piutang pada PT GIS sudah sesuai atau tidak dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan Public)
2.	Gary Hanel2013	Evaluasi sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti Amurang	Penerapan pengendalian intern terhadap piutang uusaha pada PT. Nusantara Surya Sakti Amurang cukup efektif

3.	Nabila Habibie2013	Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Cabang Manado	Secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern.
4.	Tororeh2016	Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Manado	Menunjukan bahwa sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Manado Sudah berjalan cukup baik.
5.	Mutawakil2014	Evaluasi sistem pengendalian internal piutang pada UMKM (Kasus pada <i>Technomart international group Jember</i>)	Menyatakan bahwa sistem pengendalian internal piutang pada <i>Technomart international group Jember</i> menurut kerangka COSO, unsur lingkungan pengendalian, unsur aktivitas pengendalian, unsur penilaian resiko, unsur informasi dan komunikasi dan unsur pengawasan kurang memadai.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kacamatan ponelo kepulauan memiliki misi mensejahterakan masyarakat dengan berbagai programnya. Salah satu programnya dalam hal ini adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang memberikan pinjam terhadap kelompok SPKP. Dalam pelaksanaan program SPKP ini otomatis akan menimbulkan piutang. Piutang yang merupakan aset perusahaan perlu pengelolaan dan pengendalian piutang yaitu dimulai dari pemberian kredit, penagihan, sampai pada penetapan dan pengendalian yang layak. Untuk lebih jelasnya, penelitian akan menggambarkan kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

(Sumber : PNPM Mandiri perdesaan Desa Tihengo Kecamatan Ponelo
Kepulauan)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penilitian adalah menganalisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota pada Unit Simpan Pinjam PNPM MPd Didesa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan. Periode bulan Juni-September 2022.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif, dimana Creswell (2016 : 16) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancara peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2022 : 26), Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Adapun menurut Raco (2018:7) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Studi Kasus, dimana penelitian studi kasus menurut Creswell (2022:23) merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2016:17).

3.2.2.Operasionalisasi Variabel Penelitian

Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis Sistem Pengendalian Internal piutang pada Anggota Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Dalam penelitian ini, variabel penelitian dioperasionalisasikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Sistem pengendalian internal Piutang Pada PNPM-MPD Desa Tihengo	Analisis Pemberian Kredit	1. Karakter 2. Kapasitas 3. Jaminan 4. Modal 5. Kondisi
kecamatan Ponelo Kepulauan	Penagihan	1. Melalui Surat 2. Melalui Telepon 3. Kunjungan Personal 4. Tindakan-tindakan Hukum

	<p>Penetapan dan pengendalian intern yang layak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab manajemen 2. Kepastian yang wajar 3. Keterbatasan yang melekat (intern) 4. Metode pengelolaan data
--	---	--

3.2.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sampelnya disebut informan dan non-responden. Informan penelitian adalah orang-orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi atau keadaan konteks peneliti dan yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong 2015:163). Pemilihan informan untuk memperoleh data, dipilih dengan menggunakan teknik *snowballing sampling*. Berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian ini adalah semua unsur yang berperan sebagai aktor, sehingga dalam penelitian ini peneliti berhubungan dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Keseluruhan informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi atau sudah sampai pada taraf jenuh (*redundancy*), maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru. Adapun informan penelitian pada Unit Usaha Simpan Pinjam PNPM Mandiri perdesaan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan adalah:

Tabel 3.2 Jumlah Informan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Gusten Olii	Ketua Pengelola PNPM MPd
2.	Adrian Ismail, S.Kom	Sekretaris
3.	Selvi Buheli	Kelompok Cahaya Indah
4.	Wirna Hadi	Kelompok Delima
5.	Sandra Pulu	Kelompok Mekar Jaya
6.	Birda Hasan Umar	Kelompok Manggis

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu di kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah hasil wawancara mendalam.
- 2) Data Kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah perhitungan jumlah Piutang pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tihengo Kecamatan Kepulauan Ponelo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam kepada informan.
- 2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, di peroleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi (*documentation*) Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Observasi partisipasi ditujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, tindakan, atau perbuatan yang difenomenakan oleh para individu (subjek/informan) dalam lingkungan etnisnya
2. Wawancara Mendalam merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai temuan informasi/data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara luas mengacu pada setiap

narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam mendeskripsikan tindakannya sendiri, pengalaman dan keyakinan

3.2.6 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell, analisis data pada studi kasus harus terinci beserta setting atau latar belakangnya. Apa bila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka analisisnya akan memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Sedangkan menurut Stake (dalam Wahyuningsih, 2013:6) mengungkapkan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni sebagai berikut.

1. Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.
2. Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna dari nyataan pamen cari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna.
3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadan antara dua atau lebih kategori. Kesepadan ini dapat dilaksanakan melalui tabel yang menunjukkan hubungan antara dua kategori.
4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistic melalui analisa data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar

dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

3.2.7 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut, peneliti secara simultan dan inheren juga melakukan pengecekan keabsahan data. Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. Dengan kata lain, peneliti perlu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran data/informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir penelitian terutama pada data/informasi yang dianggap meragukan peneliti.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar/kriteria dari Lincoln dan Guba (1995), yaitu Standar Kredibilitas (*Credibility*) merupakan standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang bersumber dari data/informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara lain:

- a. Melakukan triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh adalah data yang absah. Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi terdiri dari empat hal yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber data: Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
 - 2) Triangulasi Teori: Yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan
- b. Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.
- c. Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan pengamatan secara tekun dan terarah sejalan dengan apa yang ada saat wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari-hari informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelusuran lebih dapat dipusatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PNPM Mandiri perdesaan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Tihengo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

Desa ini terdiri dari tiga dusun, yakni dusun palima, dusun pantai bugis dan dusun yapi-yapi dengan luas wilayah 142 Ha dengan jumlah penduduk 1112 juta. Desa Tihengo pada awalnya hanya sebuah dusun di Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, Tihengo menjadi sebuah desa tepatnya pada tahun 2011.

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi PNPM

1. BKAD

BKAD adalah lembaga tertinggi dalam PNPM-MPd. Yang berperan strategis dan menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan pelaksanaaan PNPM-MPd dikecamatan BKAD adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa disuatu wilayah kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM-MPd. Yang diputuskan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

2. Ketua UPK

- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.

- b. Memastikan dilaksanakan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan
- d. Melaksanakan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK
- e. Melakukan verifikasi terhadap aggaran yang dibuat oleh bendahara
- f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan
- g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian investaris dan administrasi kantor

3. Bendahara UPK

- a. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri perdesaan dan dana bergulir
- b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan pengeluaran
- c. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi
- d. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/ tutup buku bulanan
- e. Pada akhir bulan, membuat laporan keuangan UPK terkait BLM dana kegiatan PNPM Mandiri perdesaan dan dana bergulir
- f. Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan

- g. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK

- h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran

4. Sekretaris UPK

- a. Merencanaan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor

- b. Mengelolaan dokumentasi dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.

- c. Mengelolaan invertaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).

- d. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan kedalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dab buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

5. Tim Verifikasi

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen rancangan RKP Desa.

- b. Observasi lapangan untuk melihat kesesuaian usulan kegiatan dalam rancangan RKP Desa.

- c. Membuat Rekomendasi hasil verifikasi.

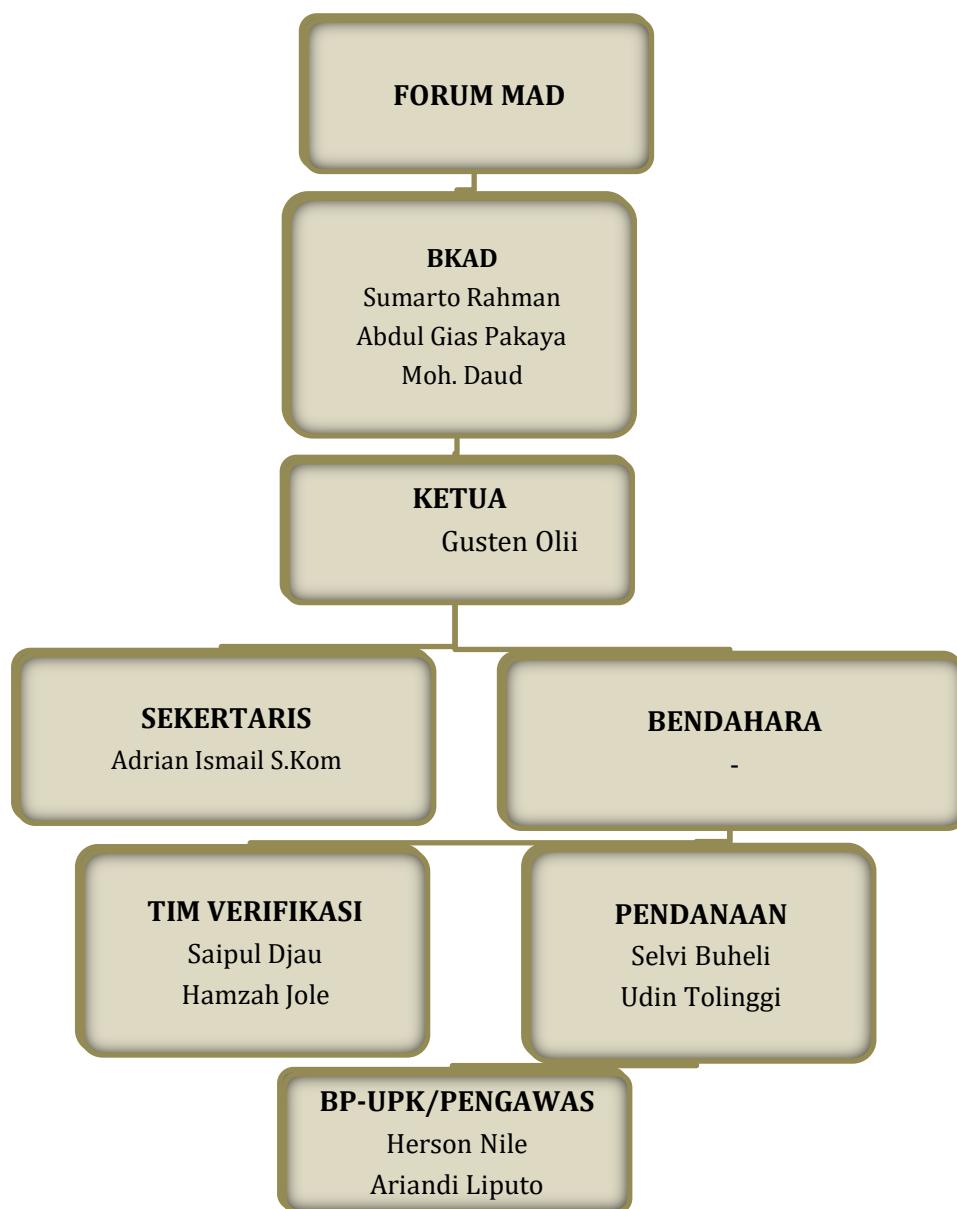
6. Pendanaan

- a. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasanseni pertunjukan.

- b. Berupaya pengalangan dana bantuan non uang, seperti sumbangan pemikiran, tenaga,pinjaman tempat dan fasilitas.
- c. Menyakinkan pada pihak lain megenai pentingnya visi dan misi pertunjukan yang bergelar sehingga pihak lain teryakinkan untuk mendukung pementasan yang akan digelar.

7. BP-UPK/Pengawas

- a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi,dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK,
- b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran,
- d. Memantau pelaksanaaan tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK,
- e. Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK,
- f. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan,
- g. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada MAD/BKAD.



Gambar 4.1
Struktur organisasi UPK PNPM

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan peneliti dari pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

4.2.1 Analisis Penerimaan Kredit

Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh UPK, Hal pertama yang dilakukan peminjam yaitu membentuk kelompok. Dalam sebuah kelompok minimal 3 orang dan maksimal 20 orang yang berdomisili disatu desa yang sama dibuktikan dengan foto kopi KTP dan wajib mendapat persetujuan dari salah satu anggota keluarganya, Serta memiliki aturan kelompok sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yakni ketua UPK, Bagaimana PNPM bisa menilai calon nasabah dalam analisis Kredit? Beliau menjelaskan:

“Bagi PNPM di UPK, nasabah yang memperoleh pinjaman yang pertama yang termasuk dalam rumah tangga miskin yang ada di desa bersangkutan.”(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh sekretaris UPK, bahwa :

“Kami menilai kepada nasabah yang memiliki status rumah tanggamiskin.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Dalam melindungi uang yang dipinjamkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak UPK membuat suatu kesepakatan untuk menghindari resiko kredit macet. Kesepakatan tersebut berupa jaminan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yg disengaja maupun tidak disengaja.

Sebagaimana yang diungkapkan:

“Awalnya, untuk dana awal masuknya PNPM itu jaminan untuk nasabah itu karna mereka rumah tangga miskin apa saja yang bisa dinilai apa saja yang bisa dijaminkan terutama tersertifikat dan tanaman-tanaman tahunan.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

“Apa saja yang bisa dinilai dan apa saja yang bisa dijaminkan terutama yang tersertifikat dan tanaman-tanaman tahunan.” (Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi UPK dimana mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan. Dalam hal ini pemberian kredit akan mempertimbangkan jumlah kredit yang diberikan terutama dalam mempertimbangkan kondisi perekonomian. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua UPK, yakni:

“Hal-hal perlu diperhatikan bagi rumah tangga miskin yaitu mereka yang mempunyai jenis usaha yang bisa dikembangkan.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

“Ya jelas, untuk memberikan kredit kepada mereka kita mempertimbangkan perekonomian nasabah terutama rumah tangga miskin apakah kredit yang diberikan ini tidak membebani mereka atau bisa menimbulkan mereka sangat kesulitan mengembalikan angsuran atau pinjaman dalam setiap bulannya.”(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pertanyaan yang sama juga di ungkapkan oleh sekertaris UPK, bahwa :

“Tentunya nasabah yang mempunyai jenis usaha yang bisa dikembangkan.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

“Sebab kondisi perekonomian perlu kita pertimbangkan karena demi kelancaran dari pada nasabah untuk mengembalikan atau membayarangsuran atau pinjaman dalam setiap bulannya.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Hal ini sesuai dengan pertanyaan Hermanto (2015), Kredit memiliki manfaat yang cukup banyak dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi kreditur, kredit memberikan manfaat agar kreditur dapat meningkatkan usaha yaitu dengan menggunakan kredit tersebut untuk meningkatkan faktor produksi, baik berupa tambahan modal maupun meningkatkan sumberdaya manusia.

4.2.2 Penagihan (*Collection*)

Prosedur penagihan yang ditetapkan oleh UPK merupakan penagihan tanggung renteng. Sebelum hutang oleh kelompok SPKP jatuh tempo, para anggota atau yang menggunakan pinjaman dari UPK mengumpulkan angsurannya terlebih dahulu kepada bendahara kelompok. Jika semua anggota telah menyetor ke bendahara kelompok, selanjutnya bendahara yang menyetor ke kantor UPK. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua-ketua kelompok :

“Langsung disetor ke ketua UPK, tapi kalo ada anggota yang belum membayar kami menunggu yang lain belum menyetor.”(Ketua kelompok Delima, 22 januari 2023)

“Dikumpul di ketua kelompok dulu baru di setor ke ketua UPK”
(Ketua kelompok Mekar Jaya, 31 januari 2023)

“Langsung di setor ke ketua UPK dan yang lain nanti ditagih”
(Ketua kelompok Cahaya Indah, 31 januari 2023)

Piutang yang diberikan oleh UPK merupakan dana bergulir atas dasar kepercayaan. Artinya, pinjaman atau pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan yang rentan terhadap meyelewengan. Maka dari itu dibentuk penanganan yang dilakukan oleh UPK untuk menghindari hal tersebut dan terhadap kelompok yang menunggak yaitu memberikan teguran baik secara langsung maupun via

telpon, jika tidak bisa dengan cara tersebut UPK akan mengadakan pertemuan terhadap kelompok tersebut dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua UPK, yakni :

“Seorang kreditur bisa ditagih melalui surat yaitu yang pertama pada saat itu yang melakukan pinjaman dana bergulir setelah dana PNPM ini awalnya dikembangkan akan digulirkan kembali yang ditagih melalui surat itu apabila sudah didatangi oleh pihak pelaku dari PNPM atau tukang tagih sudah diberikan pencerahan ada kesepakatan pemahaman jika itu lagi tetap masih menunggak maka kami melayangkan surat kepada yang bersangkutan.(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pertanyaan yang diungkapkan Ketua UPK dipertegas oleh sekertaris UPK, yakni :

“Setelah dilakukan komunikasi secara berulang-ulang baik secara langsung maupun tidak langsung namun hal ini belum mampu membuat nasabah mengembalikan atau membayar pinjamannya maka kami akan melayangkan surat kepada nasabah tersebut.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Setiap nasabah melakukan penyetoran kepada pihak UPK, bendahara akan menerima setoran tiap nasabah dimana bendahara mencatat setiap transaksi keuangan, memegang dan menyimpan semua rekening bank dana dan memegang dan menyimpan uang kas. Hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara UPK, yakni :

“saya menerima setiap setoran dari masing-masing kelompok, setoran tersebut kemudian dicatat dan disimpan di rekening bank dana PNPM” (Ketua UPK, 11 Maret 2023)

“kemudian kami melakukan perhitungan saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi, membuat rekonsiliasi bank terhadap penutupan trasansaksi dan melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK serta membuat perencanaan keuangan dan anggaran”(Ketua UPK, 11 Maret 2023)

Jangka waku pengendalian pinjaman yakni 12 bulan s/d 15 bulan diangsur setiap bulan dan perempat bulan dengan ketetapan bunga sebesar 1,1% , dari hasil wawancara yakni :

“Pada saat bergulirnya dana PNPM di2013, 2014 itu awalnya semuanya itu berkisar 12 bulan setelah berakhirnya PNPM dan lahirnya Undang- undang Desa tentang Desa maka tinggal menyisahkan dana bergulir ytaitu Dana pengembalian dari masyarakat atau nasabah maka setelah pinjamannya meningkat maka kita juga kenaikan jangka waktunya yaitu 15 bulan sampai 18 bulan sehingga angsuran dari masyarakat ini berkurang namun jangka waktu bertambah.”(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai besarnya bunga yang dikenakan pada PNPM untuk nasabah, sebagaimana yang dijelaskan :

“Nah, untuk bunga sesuai kesepakatan musyawarah yaitu 2% dikelompok terus yang disetor ke UPK 1,5% jadi yang 0,5 itu merupakan operasional kelompok.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

Adapun sanksi yang diberikan kepada kelompok yang melakukan tunggakan serta penundaan pencairan bagi kelompok tersebut, maka pengelola UPK akan melakukan penagihan. Jika setelah dilakukan penagihan namun belum upaya untuk melunasi atau membayar pihak UPK akan memberikan tindakan hukum sebagaimana yang dijelaskan yakni :

“Bila telah dilakukan berbagai upaya komunikasi musyawarah dan juga berbagai hal penjadwalan kembali terhadap yang bersangkutan selama berliau masih punya niat baik kami belum dari UPK belum melakukan tindakan hukum bila telah sampai beberapa kali telah diperingatkan dan juga yang bersangkutan sesuai analisis dari UPK punya kemampuan untuk membayar tapi tidak untuk melaksanakannya maka akan dilalui jalur hukum”(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh sekertaris UPK, yakni :

“Apa bila kreditur tidak membayar setelah kita lakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung secara berkali-kali sudah dilayangkan surat berkali-kali maka kami akan menempuh jalur hukum.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Dengan adanya sanksi ini sangat berpengaruh penting terhadap meminimalkan piutang tertunggak. Hal tersebut dapat kita lihat dari mekanisme sistem ini, pitang oleh kelompok SPP bukan Cuma kelompok tersebut yang akan menanggungnya tetapi kelompok yang ada dalam desa tersebut juga ikut berperan dalam penanggulangan piutang dengan cara berkomunikasi dan memberikan masukan.

4.2.3 Penetapan dan pengendalian yang layak

Program kelompok SPKP yang dikelolah oleh UPK merupakan program pemberdayaan masyarakat, yang menandakan program salingmembantu antara pihak kelompok SPKP dan pihak UPK. Sistem pengendalian piutang yang ditetapkan berupa kesepakatan antara pihak kelompok SPKP dengan pihak UPK yang disebut sistem tanggung renteng. Jika dalam satu kelompok ada anggota yang pada saat jatuh tempo kredit tidak mampu menyetor/melunasi hutangnya, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut akan menanggulangi anggota yang tidak mampu dengan persyaratan dilain waktu anggota tersebut akan melunasi kembali ke kelompok sesuai dengan tunggakanya.

Salah satu tindakan pengendalian yang dilakukan oleh UPK yaitu verifikasi yang diperketat. Seperti yang di jelaskan sebelumnya, verifikasi melalui 2 tahap yaitu verifikasi proposal dan verifikasi kelompok. Selain dari itu, tindakan lainnya yaitu diadakan pembinaan oleh tim Badan Kerja Sama Desa (BAKD)dalam hal

manajemen untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial kepada kreditur.

Sebagaimana yang diungkapkan, yakni :

“Ya, kami menekankan tanggung jawab sosial pada nasabah PNPM karena dana ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri jadi seutuhnya adalah milik masyarakat karena itu mereka punya tanggung jawab besar terhadap dana ini karena setelah dikembalikan dana ini akan digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama rumah tangga miskin.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pernyataan yang sama dipertegas oleh sekertaris UPK, yakni :

“PNPM merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sehingga dana ini adalah dana miliki masyarakat sehingga mereka harus mempunyai tanggung jawab besar terhadap dana tersebut karena setelah dilakukan pengendalian dana ini akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan terutama mereka yang memiliki status rumah tangga miskin.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

Dalam hal diberlakukannya program SPKP ini terdapat kriteria yang menentukan kredit kepada nasabah, sebagaimana pertanyaan ketua UPK :

“Berbagai macam kriteria awalnya yang pertama untuk program regular yaitu dana pertama PNPM masuk itu kita hanya mengacu dirumah tangga miskin dan punya usaha, dulu setelah dana bergulir maka diliat kembali pergulirnya yang pertama yaitu kemampuan usahanya, jenis usahanya dan karakter atau watak yang bersangkutan dan yang utama itu tetap mengacu pada rumah tangga miskin.(Ketua UPK, 23 februari 2023)

Adapun dalam melaksanakan pengendalian internal keterbatasan dan ada yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data tetap dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, yakni :

“Ya, kita punya keterbatasannya dalam pengendalian ini yang pertama kita mengacu di standar operasional yang sesuai sehingga ada hal-hal kita kembangkan kita masih berumur panjang terkait itu apakah itu melanggar apa tidak, Kedua kemampuan dari kita sendiri keterbatasannya itu akses untuk hal-hal yang lebih baik dalam penyimpangan UPK.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

“Ya, kita punya keterbatasannya dalam pengendalian ini yang pertama kita mengacu di standar operasional yang sesuai sehingga ada hal-hal kita kembangkan kita masih berumur panjang terkait itu apakah itu melanggar apa tidak, Kedua kemampuan dari kita sendiri keterbatasannya itu akses untuk hal-hal yang lebih baik dalam penyimpangan UPK.” (Ketua UPK, 23 februari 2023)

Pernyataan yang sama dipertegas oleh sekertaris UPK, yakni :

“Paling tidak ada dua hal keterbatasan kami dalam pengendalian internal yang pertama adalah standar operasional maksudnya adalah ketika kita ingin mengembangkan hal-hal yang kita anggap baik namun jika itu tidak ada di standar operasional maka kita tidak bisa melakukan hal tersebut, Kedua keterbatasan dari kita masing-masing individu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

“Pertimbangan kami atau dasar kami untuk melakukan pengumpulan data yakni demi keberlangsungan dari kegiatan UPK ini, sehingga dalam kegiatan simpan pinjam atau pinjaman maka kami harus membutuhkan data yang Rill dari semua nasabah.”(Sekertaris UPK, 8 Maret 2023)

4.3 Pembahasan

Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dalam mengelola dana bergulir bergantung pada sistem pengendalian piutangnya. Sehingga tujuan dari UPK memberikan piutang pada kelompok SPP dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak anggota atau calon anggota lainnya, dengan demikian program tersebut akan memberikan manfaat yang banyak terhadap masyarakat yang terbantu dalam hal pembiayaan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga (Rival 2010). Adapun jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu berdasarkan tujuan dan jangka waktu piutangnya. Dikaitkan dengan teori tersebut piutang yang diberikan oleh UPK disebut dengan pembiayaan karena merupakan suatu bentuk pendanaanyang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk dipergunakan dalam suatu usaha, pembiayaan diberikan dengan syarat harus dipergunakan sebaik-baiknya, baik itu untuk melalui usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Jenis pembiayaan oleh UPK menurut tujuannya adalah pembiayaan modal usaha yang dimaksudkan untuk memberikan modal dalam rangka pengembangan usaha, sedangkan menurut jangka waktunya adalah pembiayaan jangka pendek yang dilakukan dengan waktu 1 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian tujuan pemberian piutang yang dilakukan oleh UPK ini tidak lain adalah untuk mendorong para ibu-ibu agar lebih produktif sehingga bisa lebih mandiri dalam membantu perekonomian keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan modal untuk mengembangkan atau menjalankansuatu usaha, hal ini sejalan dengan ajaran islam untuk saling tolong-menolong.

Kehadiran UPK juga sangat bermanfaat dalam mengurangi angka pengangguran, mengajarkan kemandirian dankerja sama. Hal demikian dapat terlihat saat wawancara dengan berbagai anggota kelompok SPKP, yang menyatakan pembiayaan oleh UPK sangat membantu perekonomian kami, dan mengurangi pengangguran. Ini sejalan dengan tujuan dari pembiayaan yaitu bertujuan untuk peningkatkan ekonomi masyarakat, tersediakannya dana bagi

peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baju dan terjadi distribusi pendapatan.

Hasil wawancara mengenai pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK bahwa sistem yang diterapkan diberikan secara berkelompok, artinya dengan sistem ini apabila ada salah anggota yang tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu maka pembayaran akan ditanggung oleh semua anggota yang ada dalam kelompok tersebut dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran oleh kelompok terhadap UPK.

Adapun pengelolaan dan pengendalian piutang yang dilakukan oleh Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yaitu :

a. Pemberian Kegiatan Kredit

Prosedur Pemberian Kredit yang oleh UPK dalam mengelolah dan pengendalian piutang yang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelolah Kegiatan. Hal demikian dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit yang dimulai dari pembentukan kelompok, pengajuan proposal, verifikasi, dan penyaluran yang diatur dalam SOP UPK dan telah dilakukan sesuai dengan standar tersebut.

b. Penagihan (*Collection*)

Adapun mekanisme penagihan yang dilakukan oleh UPK sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelolah Kegiatan (UPK). Hal tersebut terlihat dari prosedur penagihan atau pengendalian angsuran pinjaman yaitu :

- 1) Pembayaran dilakukan oleh ketua kelompok pada UPK yang diatur dalam SOP dan telah disampaikan kepada seluruh kelompok SPKP dalam rapat verifikasi kelompok.
 - 2) Teguran atau peringatan, hal demikian dilakukan jika langkah pertama tidak terlaksana. Teguran atau peringatan baik secara langsung maupun via telpon telah dilakukan oleh pihak UPK, jika telah diperintahkan tetapi tidak membayar maka akan dilalui jalur hukum.
 - 3) Pertemuan UPK dengan kelompok, hal tersebut dilakukan jika peringatan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pertemuan ini akan membahas dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
- c. Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian yang layak
- Penetapan dan pengendalian yang layak ditetapkan oleh UPK sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tihengo. Pengelolaan piutang pada UPK sangat bermanfaat dalam meminimalkan piutang tertunggak. Hal ini dapat terlihat dari prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan dengan efektif, prosedur penagihan yang efektif serta adanya penetapan dan penyelenggaran pengendalian yang layak.
- Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari informan, manajemen dalam hal mempertimbangkan tanggung jawab sosial perlu karena mereka menekankan tanggung jawab sosial pada nasabah PNPM dimana program ini milik masyarakat dan akan digulirkan kembali pada masyarakat rumah tangga miskin. Selain itu dilaksanakan pengendalian internal dengan tujuan meminimalkan piutang tertunggak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penerimaan kredit yang diterapkan oleh UPK Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan, menilai calon debitur yang memiliki status rumah tangga miskin.
2. Sistem penagihan yang diterapkan oleh UPK Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan, melakukan penagihan dengan cara melayangkan surat kepada Debitur tersebut dan apabila debitur tetap tidak membayar maka kami akan menempuh jalur hukum.
3. Sistem penerapan dan pengendalian yang diterapkan oleh UPK Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan melalui pemberian kredit, penagihan, dan penyelenggaraan pengendalian yang layak belum dilaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan Informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Dalam menjamin keberlangsungan piutangnya disarankan agar menambah pengurus UPK yaitu Bendahara agar terjalin sistem tanggung jawab sosial dan selalu terjalin kerja sama yang baik dari semua pihak seperti pengurus UPK, ketua kelompok dan anggota kelompok .

2. Dalam melakukan verifikasi dan analisis oleh UPK kepada calon debitur, tim verifikasi harus lebih memperhatikan kondisi calon debitur tersebut apakah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam SOP UPK atau tidak sehingga layak untuk dilakukan pembiayaan serta wajib menjelaskan mengenai paham kredit kepada calon debitur. Diharapkan dengan debitur yang berkualitas, maka jumlah angsuran yang menunggak dan piutang menjadi semakin kecil
3. UPK lebih meningkatkan pengawasan kredit dan lebih tegas dalam penagihan kepada calon debitur agar piutang yang menunggak dapat diminimalkan sekecil mungkin, atas kondisi situasional masing-masing debitur.
4. Untuk anggota kelompok yang ingin tergabung dalam kelompok SPKP agar menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan kepercayaan karena pengendalian piutang sebenarnya telah dimulai dari pembentukan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agroes, Sukrisno. *Auditing, Edisi keempat Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Ayu, Susilowati Dyah."Analisa Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Semarang" Dalam Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol.18 No.1 Tahun 2017. Semarang.
- Creswell, 2016 . *Research Design* : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Diana, Anastasia dan Setiawati, 2011, *Sistem informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Dyah, A. S. (2017). Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Semarang. *Vol. 18 NO. 1 Tahun 2017 Semarang, 18.*
- Hery, 2013,*Akuntansi Dasar 1 Dan 2*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana I
- Hery, 2011. *Auditing 1 Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencang.
- Ndonesia ----, 2009, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*,Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- I Gusti Putu, "Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mp) Terhadap Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung." Diambil Dari :<Http://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/EEB/Article/Viewfile/12357/9225>. (Online : Jumat 10 September 2016).
- Manurung, Elvy Maria, 2011, *Akuntansi Dasar*, Jakarta : Penerbit Erlangga

Nor Aida, "Eektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. (Online : Rabu 28 September 2016)

Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : ICAPI

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013.

Sanusi, A. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakartas: Salemba Empat, 2013.

Tahumang, S. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT.HASJRAT ABADI TOYOTA CABANG MANADO. *Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 241-250.Iyono.

Tjodi, A. M. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT.BANK SULUTGO KCP RANOTANA. *Jurnal EMBA*, 5, 857-866.

Tahumang, S. (2017). Analisis Sistem Pengendandalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Hasjrat Abadi Toyota Cabang Manado. *Riset Akuntansi Going Concern* 12(2) ,241-250.

Widiasmara, Anny. "Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Dabt) Pada PT. Wahana Otomitra Multiartha,Tbk Cabang Medium" Dalam Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol.3 No.3 Tahun 2017. Medium.

Wahyuni, Dewi *Pengendalian Internal COSO*, Dakses dari Wahyunidewi77.blogspot.com, Tanggal 6 April 2018.

Wahdiah. 2017. *Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(Pnpm-Mpd)* Di Kecamatan Astambul.

(<http://www.google.co.id/amp/s/docplayer.info/amp/56964013-oleh-wahdiah-nim.html>, diakses 12 september 2018)

Widanarto, M.V.C., dan Sudibia, K. 2016. efektivitas program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) Pnpm Mandiri perdesaan di kecamatan Kuta Selatan kabupaten Bandung. *E-Jurnal ekonomi dan bisnis Universitas Udayana.* Vol.5 No.2.

Yuliana, Ena, Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,Riau,2012,Skripsi.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Gusten Olii

Jabatan : Ketua UPK PNPM Mpd

No	Pertanyaan	Jawaban
	Analisis Penerimaan Kredit:	
1	Bagaimana PNPM bisa menilai calon nasabah dalam analis kredit ?	Bagi PNPM di UPK, nasabah yang memperoleh pinjaman yang pertama yang termasuk dalam rumah tangga miskin yang ada di desa bersangkutan
2	Bagaimana jika terjadi kredit macet atau pihak nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan ?	Bila terjadi kredit macet maka dari kami UPK itu ada Tim akan turun untuk mengunjungi langsung pada masyarakat tersebut dilakukan komunikasi awal dipertanyakan hal-hal yang menyebabkan sampai mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman angsuran perbulannya. Awalnya kita lakukan dulu musyawarah
3	Apa saja yang dapat dijadikan jaminan oleh nasabah ?	Awalnya untuk, dana awal masuknya PNPM itu jaminan untuk nasabah itu karna mereka rumah tangga miskin apa saja yang bisa dinilai apa saja yang bisa dijaminkan terutama tersertifikat dan tanaman-tanaman tahunan.
4	Pertimbangan apa saja bagi pihak PNPM dalam menentukan jumlah kredit yang bisa diberikan kepada nasabah ?	Hal-hal perlu diperhatikan bagi rumah tangga miskin yaitu mereka yang mempunyai jenis usaha yang bisa dikembangkan.
5	Mengapa pemberian kredit harus mempertimbangkan kondisi perekonomian ?	Ya jelas, untuk memberikan kredit kepada mereka kita mempertimbangkan perekonomian nasabah terutama rumah tangga miskin apakah kredit yang diberikan ini tidak membebani mereka atau bisa menimbulkan mereka sangat kesulitan mengembalikan angsuran atau pinjaman dalam setiap bulannya.
	Penagihan:	
1	Kondisi seperti apa yang menyebabkan seorang debitur bisa ditagih melalui surat ?	Seorang debitur bisa ditagih melalui surat yaitu yang pertama pada saat itu yang melakukan pinjaman dana

		bergulir setelah dana PNPM ini awalnya dikembangkan akan digulirkan kembali yang ditagih melalui surat itu apabila sudah didatangi oleh pihak pelaku dari PNPM atau tukang tagih sudah diberikan pencerahan ada kesepakatan pemahaman jika itu lagi tetap masih menunggak maka kami melayangkan surat kepada yang bersangkutan.
2	Apakah pihak PNPM menelpon debitur jika sudah lewat jatuh tempo ?	Ya, sebelum jatuh tempo perbulannya itu kami sudah menghubungi seluruh ketua-ketua kelompok dan juga debitur bahwa tinggal beberapa hari lagi kelompok itu mengembalikan pinjamannya jadi ketua kelompok yang menyampaikan ke anggotanya.
3	Apakah pihak dari PNPM melakukan penagihan dengan mengunjungi rumah debitur ?	Ya.
4	Apakah pihak PNPM melakukan tindakan hukum jika debitur tidak membayar ?	Bila telah dilakukan berbagai upaya komunikasi musyawarah dan juga berbagai hal penjadwalan kembali terhadap yang bersangkutan selama berliau masih punya niat baik kami belum dari UPK belum melakukan tindakan hukum bila telah sampai beberapa kali telah diperingatkan dan juga yang bersangkutan sesuai analisis dari UPK punya kemampuan untuk membayar tapi tidak untuk melaksanakannya maka akan dilalui jalur hukum
5	Jangka waktu pinjaman dalam PNPM berapa kali ?	Pada saat bergulirnya dana PNPM di2013, 2014 itu awalnya semuanya itu berkisar 12 bulan setelah berakhirnya PNPM dan lahirnya Undang- undang Desa tentang Desa maka tinggal menyisahkan dana bergulir yaitu Dana pengembalian dari masyarakat atau nasabah maka setelah pinjamannya meningkat maka kita juga kenaikan jangka waktunya yaitu 15 bulan sampai 18 bulan sehingga angsuran dari masyarakat ini

		berkurang namun jangka waktu bertambah.
6	Berapa besar bunga yang dikenakan dalam pada PNPM untuk nasabah ?	Nah, untuk bunga sesuai kesepakatan musyawarah yaitu 2% dikelompok terus yang disetor ke UPK 1,5% jadi yang 0,5 itu merupakan operasional kelompok.
	Penetapan dan pengendalian intern yang layak:	
1	Mengapa manajemen perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial kepada debitur ?	Ya, kami menekankan tangguang jawab sosial pada nasabah PNPM karna dana ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri jadi seutuhnya adalah milik masyarakat karna itu meraka punya tanggung jawab besar terhadap dana ini karna setelah dikembalikan dana ini akan digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama rumah tangga miskin.
2	Kriteria apa saja yang dapat menentukan kredit layak atau tidak untuk diberikan kepada nasabah ?	Berbagai macam kreteria awalnya yang pertama untuk program regular yaitu dana pertama PNPM masuk itu kita hanya mengacu dirumah tangga miskin dan punya usaha, dulu setelah dana bergulir maka diliat kembali pergulirnya yang pertama yaitu kemampuan usahanya, jenis usahanya dan karakter atau watak yang bersangkutan dan yang utama itu tetap mengacu pada rumah tangga miskin.
3	Apakah dalam melaksanakan pengendalian internal terdapat keterbatasan, apa saja keterbatasannya ?	Ya, kita punya keterbatasannya dalam pengendalian ini yang pertama kita mengacu di standar operasional yang sesuai sehingga ada hal-hal kita kembangkan kita masih berumur panjang terkait itu apakah itu melanggar apa tidak, Kedua kemampuan dari kita sendiri keterbatasannya itu akses untuk hal-hal yang lebih baik dalam penyimpangan UPK.
4	Apakah yang terjadi dasar pertimbangan dalam	Yang menjadi dasar untuk pengumpulan data terkait dengan Program masyarakat Mandiri kita

	menentukan metode pengumpulan data ?	punya data yang Rill sehingga kita mempertimbangkan yaitu untuk keberlangsungan dari UPK ini.
--	--------------------------------------	---

Nama : Adrian Ismail, S.Kom

Jabatan : Sekretaris UPK PNPM Mpd

No	Pertanyaan	Jawaban
	Analisis Penerimaan Kredit:	
1	Bagaimana PNPM bisa menilai calon nasabah dalam analis kredit ?	Kami menilai kepada nasabah yang memiliki status rumah tangga miskin.
2	Bagaimana jika terjadi kredit macet atau pihak nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan ?	Tim penagih dari UPK itu akan turun menemui langsung nasabah tersebut atau pun nasabah bersangkutan untuk dipertanyakan penyebab mengapa nasabah tersebut tidak membayar angsuran yang pasti kami minta kejelasan atau memastikan pernyataan sifat dari nasabah akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan
3	Apa saja yang dapat dijadikan jaminan oleh nasabah ?	Apa saja yang bisa dinilai dan apa saja yang bisa dijaminkan terutama yang tersertifikat dan tanaman-tanaman tahunan.
4	Pertimbangan apa saja bagi pihak PNPM dalam menetukan jumlah kredit yang bisa diberikan kepada nasabah ?	Tentunya nasabah yang mempunyai jenis usaha yang bisa dikembangkan.
5	Mengapa pemberian kredit harus mempertimbangkan kondisi perekonomian ?	Sebab kondisi perekonomian perlu kita pertimbangkan karena demi kelancaran dari pada nasabah untuk mengembalikan atau membayar angsuran atau pinjaman dalam setiap bulannya.
	Penagihan:	
1	Kondisi seperti apa yang menyebabkan seorang debitur bisa ditagih melalui surat ?	Setelah dilakukan komunikasi secara berulang-ulang baik secara langsung maupun tidak langsung namun hal ini belum mampu membuat nasabah mengembalikan atau membayar pinjamannya maka kami akan

		melayangkan surat kepada nasabah tersebut.
2	Apakah pihak PNPM menelpon debitur jika sudah lewat jatuh tempo ?	Ya.
3	Apakah pihak dari PNPM melakukan penagihan dengan mengunjungi rumah debitur ?	Ya.
4	Apakah pihak PNPM melakukan tindakan hukum jika debitur tidak membayar ?	Apa bila debitur tidak membayar setelah kita lakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung secara berkali-kali sudah dilayangkan surat berkali-kali maka kami akan menempuh jalur hukum.
5	Jangka waktu pinjaman dalam PNPM berapa kali ?	Awal bergulirnya dana PNPM tepatnya pada tahun 2013 sampai 2014 semuanya berkisar pada 12 Bulan atau pun 1 tahun. Namun setelah berakhirnya PNPM dan lahirnya undang-undang Desa yang menyesahkan dana bergulirmaka jangka waktu pinjaman waktunya 15 Bulan sampai dengan 18 Bulan sehingga angsuran dari masyarakat ini berkurang namun jangka waktunya bertambah.
6	Berapa besar bunga yang dikenakan dalam pada PNPM untuk nasabah ?	Sesuai kesepakatan musyawarah yakni 2% dikelompok terus yang disetor ke UPK hanya 1,5% sisanya yakni 0,5 % adalah operasional kelompok itu sendiri.
	Penerapan dan pengendalian intern yang layak:	
1	Mengapa manajemen perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial kepada debitur ?	PNPM merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sehingga dana ini adalah dana milik masyarakat sehingga mereka harus mempunyai tanggung jawab besar terhadap dana tersebut karena setelah dilakukan pengembalian dana ini akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan terutama mereka yang memiliki status rumah tangga miskin.
2	Kriteria apa saja yang dapat menentukan kredit layak atau	Kemampuan berusaha dan jenis usaha karakter serta watak dari pada nasabah

	tidak untuk diberikan kepada nasabah ?	tersebut namun paling pertama tetap mengacu nasabah yang memiliki status ruah tangga miskin.
3	Apakah dalam melakukan pengendalian internal terdapat keterbatasan, apa saja keterbatasannya ?	Paling tidak ada dua hal keterbatasan kami dalam pengendalian internal yang pertama adalah standar operasional maksudnya adalah ketika kita ingin mengembangkan hal-hal yang kita anggap baik namun jika itu tidak ada di standar operasional maka kita tidak bisa melakukan hal tersebut, Kedua keterbatasan dari kita masing-masing induvidu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.
4	Apakah yang terjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data ?	Pertimbangan kami atau dasar kami untuk melakukan pengumpulan data yakni demi keberlangsungan dari kegiatan UPK ini, sehingga dalam kegiatan simpan pinjam atau pinjaman maka kami harus membutuhkan data yang Rill dari semua nasabah.

Nama : Wirna Hadi

Jabatan : Ketua Kelompok Delima

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pinjaman digunakan untuk apa?	Tambahan modal usaha
2	Modal usaha apa ?	Jualan Gorengan
3	Seberapa besar jumlah pinjaman setiap orang ?	3 juta sampai 4 juta
4	Total pinjaman paling tinggi ?	Rp. 4.000.000 Juta
5	Jangka waktu pinjaman setiap kelompok ?	15 Bulan Angsuran
6	Berapa jumlah anggota setiap kelompok ?	10 Orang
7	Apakah angsuran disetor ke bendahara kelompok atau langsung ketua UPK ?	Langsung disetor ke ketua UPK
8	Bagaimana untuk angsuran yang belum lengkap atau menunggak?	Menunggu yang lain yang belum menyetor
9	Biasanya kalau angsuran tertunggak, apa kendalanya ?	Belum ada uang, karena kurangnya pendapatan dilaut

Nama : Sandra Pulu

Jabatan : Ketua Kelompok Mekar Jaya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pinjaman digunakan untuk apa?	Tambahan Modal Usaha
2	Modal usaha apa ?	Jualan (Kios)
3	Berapa orang jumlah anggota kelompok ?	10 Orang
4	Jangka waktu pinjaman ?	12 Bulan sampai 15 Bulan Angsuran
5	Jumlah total pinjaman kelompok ?	Rp. 34.000.000 juta
6	Apakah angsuran di setor ke bendahara kelompok atau langsung ke ketua UPK ?	Dikumpul di ketua kelompok dulu baru di setor ke ketua UPK
7	Kalau ada anggota yang salahnya menunggak,apakah berpengaruh keanggota lain ?	iya, berpengaruh karna salah satunya nasabah ba ambe ulang akan jadi bahan pertimbangan dan pinjamnya tidak bisa naik lebih tinggi dari pinjaman sebelumnya
8	Total pinjaman paling tinggi ?	Rp. 10.000.000 Juta

Nama : Birda Hasan Umar

Jabatan : Ketua Kelompok Manggis

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pinjaman digunakan untuk apa?	Tambahan Modal Usaha
2	Modal usaha apa ?	Kios dan Jualan Online
3	Berapa orang jumlah anggota kelompok ?	8 Orang
4	Jangka waktu pinjaman ?	15 Bulan Angsuran
5	Jumlah total pinjaman kelompok ?	Rp. 20.892.000 juta
6	Apakah angsuran di setor ke bendahara kelompok atau langsung ke ketua UPK ?	Dikumpul di ketua kelompok dulu baru di setor ke ketua UPK
7	Cara penyetoran ?	Yang ada dulu baru disetor ke UPK
8	Biasanya kalau angsuran tertunggak, apa kendalanya ?	Kalau untuk saya Menunggu gaji (ketua kelompok)
9	Total pinjaman paling tinggi ?	Rp. 7.000.000 Juta

Nama : Selvi H. Buheli

Jabatan : Ketua Kelompok Cahaya Indah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pinjaman digunakan untuk apa?	Tambahan Modal Usaha
2	Modal usaha apa ?	Kios dan Alat Nelayan
3	Berapa orang jumlah anggota kelompok ?	9 Orang
4	Jangka waktu pinjaman ?	15 Bulan Angsuran
5	Jumlah total pinjaman kelompok ?	Rp. 45.000.000 Juta
6	Total pinjaman paling tinggi ?	Rp. 10.000.000 dari 9 Orang Anggota
7	Apakah angsuran disetor ke bendahara kelompok atau langsung ke ketua UPK ?	Langsung di setor ke ketua UPK dan yang lain nanti ditagih
8	Biasanya kalau angsuran tertunggak, apa kendalanya ?	Mulainya tunggak adanya pandemi covit-19 terbawa sampai sekarang belum ada yang lunas sehingga tidak bisa memasukan proposal pinjaman

Foto Bersama Ketua UPK PNPM Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan



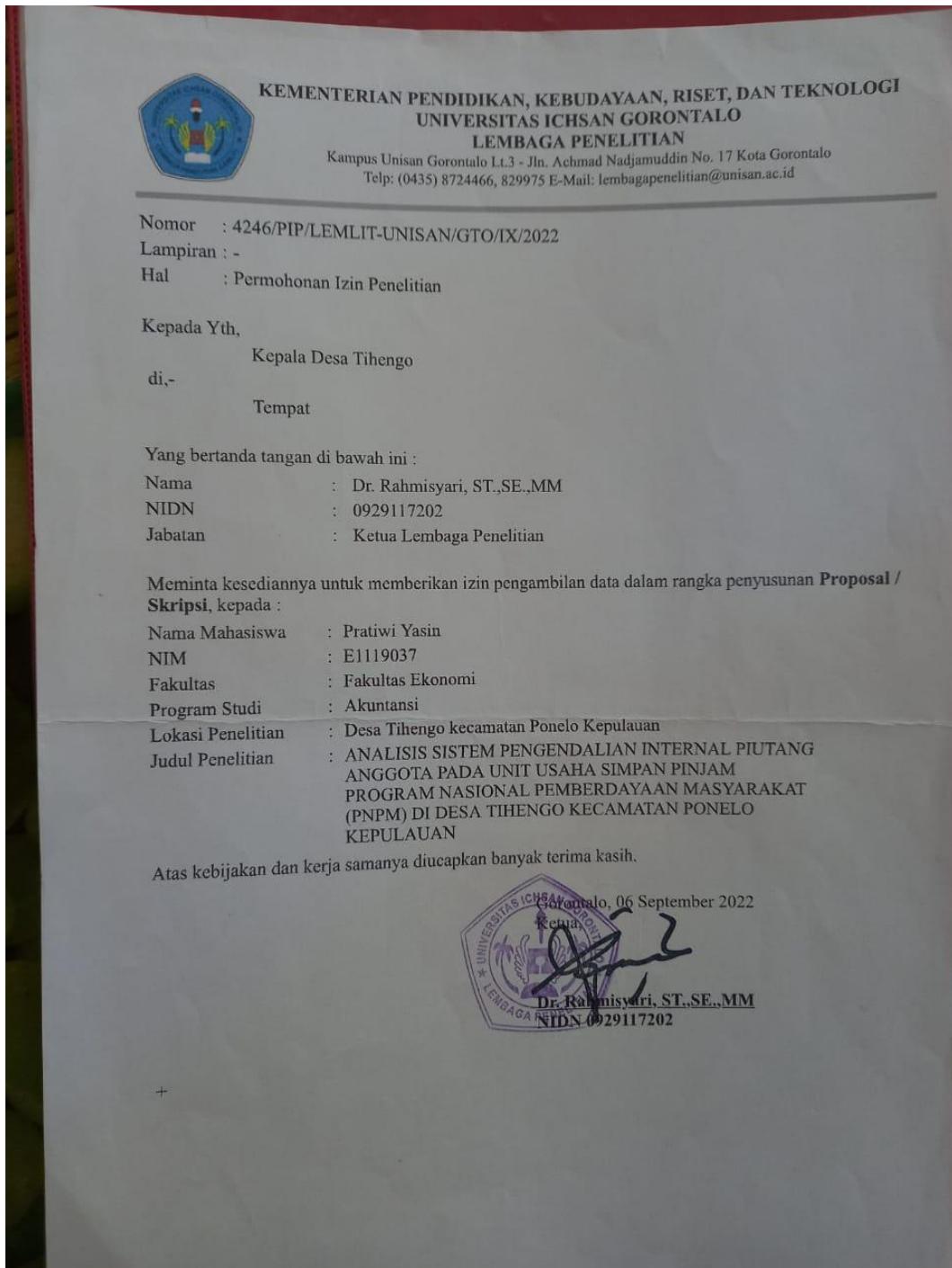
Foto Bersama Sekertaris UPK PNPM Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan

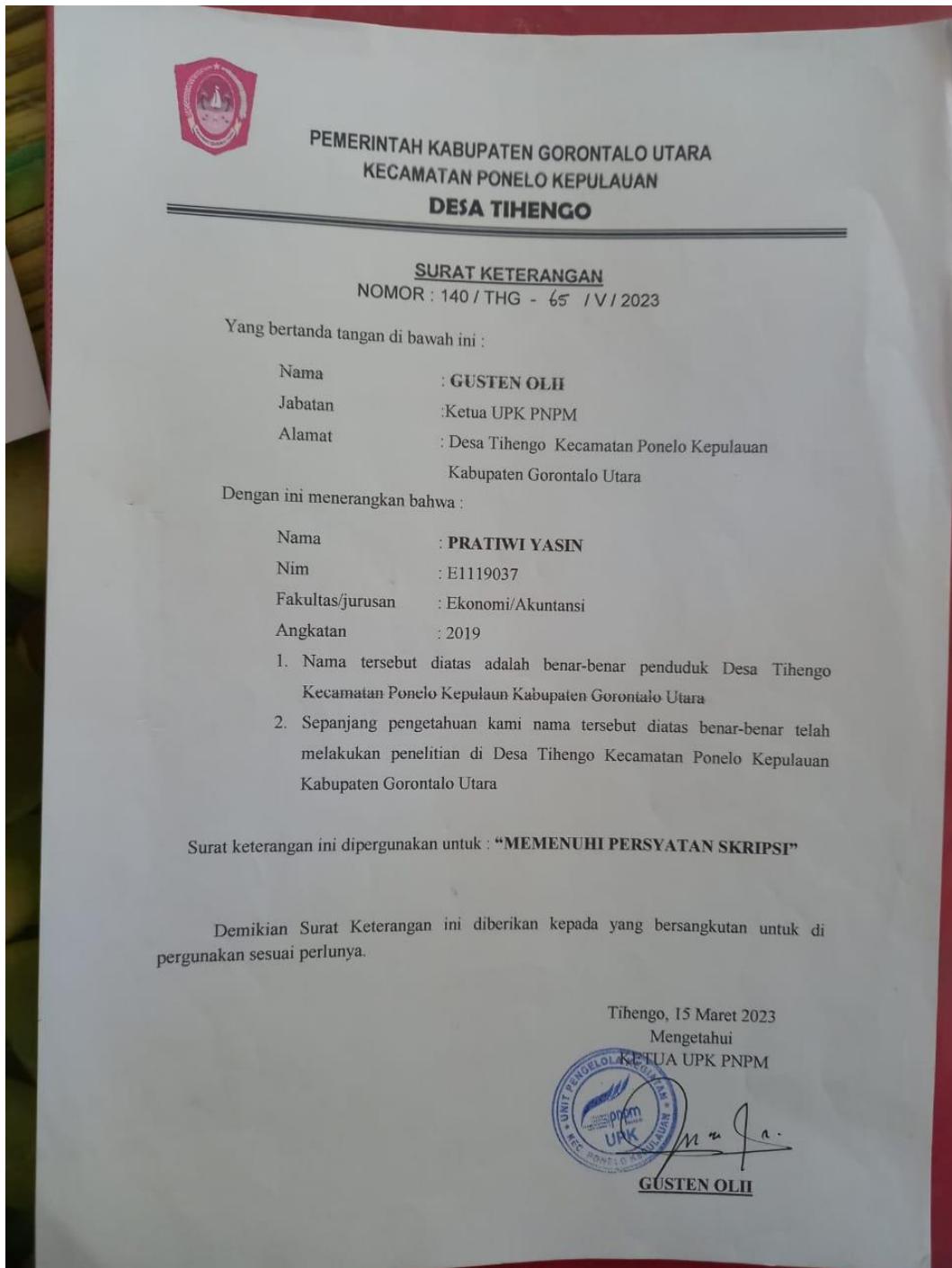


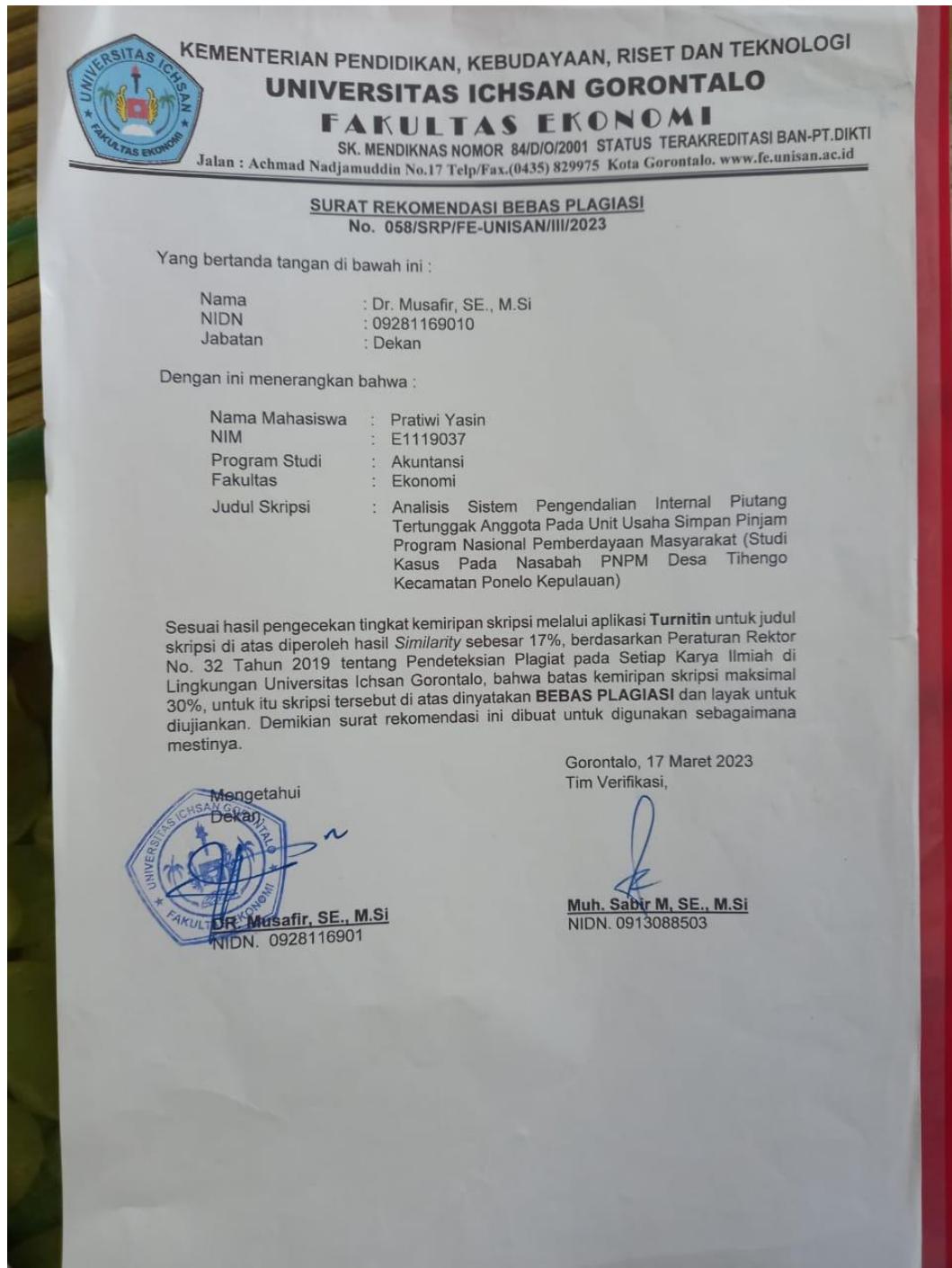
Foto Bersama Ketua kelompok SPKP Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan











 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:32553397

● 17% Overall Similarity
Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

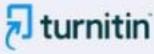
Rank	Source	Internet	Similarity (%)
1	core.ac.uk	Internet	4%
2	eprints.untirta.ac.id	Internet	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet	1%
4	repository.upi.edu	Internet	1%
5	repository.umi.ac.id	Internet	<1%
6	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
7	eprints.unisnu.ac.id	Internet	<1%
8	repository.unika.ac.id	Internet	<1%

Sources overview

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:32553397

9	repository.stei.ac.id Internet	<1%
10	repository.iiq.ac.id Internet	<1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
12	id.123dok.com Internet	<1%
13	eprints.ung.ac.id Internet	<1%
14	repository.maranatha.edu Internet	<1%
15	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet	<1%
16	ejournal.unp.ac.id Internet	<1%
17	pratamafahri.blogspot.com Internet	<1%
18	eprints.umpo.ac.id Internet	<1%
19	repository.widyatama.ac.id Internet	<1%
20	media.neliti.com Internet	<1%

Sources overview

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:32553397

Sources overview

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:32553397

21	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
22	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
23	adoc.pub Internet	<1 %
24	123dok.com Internet	<1 %
25	berikutyang.com Internet	<1 %
26	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1 %
27	repository.wima.ac.id Internet	<1 %

Sources overview

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama	:	Pratiwi Yasin
Nama panggilan	:	Tiwi
Nim	:	E1119037
Tempat Tanggal Lahir	:	Ponelo, 16 Novemberi 1997
Jenis kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Status	:	Mahasiswa
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Tihengo, Kec. Ponelo Kepulauan
Email	:	pratiwiyasin97@gmail.com
No. Hp	:	0853-4021-6982
Nama Ayah	:	(Alm) Baruyi Yasin
Nama Ibu	:	Rohana Angguda
Jumlah Saudara Kandung	:	4



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2011
2. SMP Muhamadiyah Kwandang Lulus Pada Tahun 2014
3. SMA Negri 1 Gorontalo Utara Lulus Pada Tahun 2017
4. Perguruan tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi
Program Studi S1 Akuntansi 2019-2023